

## PRINSIP MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM YANG FLEKSIBEL, EFEKTIF, OPEN-MINDED, DAN PARTISIPATIF BERDASARKAN KAJIAN AL-QUR'AN

Ajril Akmal<sup>1</sup>, Ali Hamdan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

Email: [ajrilakmal47@gmail.com](mailto:ajrilakmal47@gmail.com)

### Abstract

*This article aims to analyze the principles of Islamic educational management flexibility, effectiveness, open-mindedness, and participation based on Qur'anic foundations, particularly QS. al-Hajj: 78, QS. al-Kahf: 103–104, QS. an-Nisa: 58, and QS. al-Maidah: 51. This study employs a library research method using a thematic tafsir (maudhu'i) approach and content analysis. The findings show that QS. Al-Hajj: 78 highlights the importance of flexibility and ease in managing educational institutions; QS. Al-Kahf: 103–104 underscores the need for effectiveness to ensure that educational programs generate meaningful outcomes rather than routine yet unproductive activities; QS. An-Nisa: 58 provides a normative basis for trustworthy and participatory leadership; and QS. Al-Maidah: 51 guides institutions to be open-minded yet selective in adopting innovations and establishing collaborations. Integrating these Qur'anic principles demonstrates that Islamic educational management must be adaptive, outcome-oriented, collaborative, and receptive to new ideas while maintaining ethical and spiritual foundations. This study offers a conceptual framework that can serve as a reference for strengthening the governance of Islamic educational institutions, making them more responsive, sustainable, and competitive in addressing contemporary global challenges.*

**Keywords:** Effectiveness, Flexibility, Islamic Educational Management, Open-Mindedness, Participation.

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam yang fleksibel, efektif, open-minded, dan partisipatif dengan merujuk pada landasan normatif Al-Qur'an, khususnya QS. al-Hajj: 78, QS. al-Kahf: 103–104, QS. an-Nisa: 58, dan QS. al-Maidah: 51. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa QS. al-Hajj: 78 menegaskan pentingnya fleksibilitas dan kemudahan dalam pengelolaan pendidikan; QS. al-Kahf: 103–104 menekankan efektivitas program agar tidak menghasilkan aktivitas yang sia-sia; QS. an-Nisa: 58 memberikan dasar bagi kepemimpinan yang amanah dan partisipatif; serta QS. al-Maidah: 51 mengarahkan lembaga untuk bersikap terbuka secara selektif terhadap inovasi dan kolaborasi. Integrasi nilai-nilai Qur'ani tersebut menunjukkan bahwa manajemen pendidikan Islam harus adaptif, berbasis hasil, melibatkan seluruh *stakeholder*, serta terbuka terhadap pembaruan tanpa kehilangan prinsip akidah dan etika. Kajian ini menawarkan kerangka konseptual yang dapat menjadi rujukan pengembangan tata kelola lembaga pendidikan Islam agar lebih responsif, berkelanjutan, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan global.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Fleksibilitas, Manajemen Pendidikan Islam, Open-Minded, Partisipasi.

### A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam pada era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika sosial budaya global (Zainuddin dkk., 2025). Transformasi peradaban menuntut lembaga pendidikan Islam untuk mampu beradaptasi secara cepat dan responsif terhadap perubahan, khususnya dalam aspek manajemen kelembagaan. Namun realitas menunjukkan bahwa banyak lembaga pendidikan Islam masih terkendala praktik manajemen yang bersifat kaku, tidak efektif, minim kolaborasi, dan kurang terbuka terhadap pembaruan (Hadi, 2024). Ketidaksiapan menghadapi perubahan seringkali melahirkan stagnasi mutu, lemahnya budaya organisasi, serta hilangnya daya saing lembaga pendidikan Islam di tengah kompetisi global. Kondisi

tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan institusi pendidikan dan ketidaktercapaian tujuan pendidikan Islam secara optimal.

Permasalahan mendasar dalam manajemen pendidikan Islam saat ini dapat ditinjau dari beberapa aspek (Safira dkk., 2025). Pertama, dalam aspek fleksibilitas kelembagaan, banyak lembaga pendidikan masih mengembangkan sistem pembelajaran dan kurikulum dengan pendekatan yang rigid tanpa memberikan ruang adaptasi terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kedua, efektivitas manajerial sering terhambat oleh rendahnya produktivitas kebijakan dan program pendidikan, sehingga banyak aktivitas dilakukan hanya bersifat administratif dan simbolis tanpa menghasilkan luaran yang berdampak nyata. Ketiga, rendahnya keterbukaan pemikiran (*open-mindedness*) menyebabkan lembaga pendidikan Islam seringkali enggan menerima inovasi dan kerja sama strategis, terutama dengan pihak di luar internal kelembagaan. Keempat, praktik manajemen yang minim partisipasi menyebabkan kebijakan pendidikan bersifat *top-down* dan tidak melibatkan stakeholder secara adil dan kolaboratif, sehingga menimbulkan resistensi, lemahnya rasa memiliki, dan rendahnya budaya kualitas.

Dalam konteks demikian, diperlukan fondasi filosofis dan normatif yang kuat untuk membangun konsep manajemen pendidikan Islam yang mampu menjawab tantangan modern. Al-Qur'an sebagai sumber nilai utama dalam Islam memberikan pedoman komprehensif mengenai prinsip-prinsip manajemen, kepemimpinan, serta tata kelola organisasi yang dapat menjadi dasar penguatan manajemen pendidikan Islam. Nilai-nilai Qur'ani tersebut meliputi fleksibilitas, efektivitas, keterbukaan, dan partisipasi sebagai prinsip utama yang dibutuhkan dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam modern. Di antara ayat-ayat yang relevan untuk memperkuat prinsip tersebut adalah QS. al-Hajj ayat 78, QS. al-Kahfi ayat 103–104, QS. an-Nisa ayat 58, dan QS. al-Maidah ayat 51, yang masing-masing memuat prinsip normatif tentang kemudahan dalam pengelolaan urusan, pentingnya efektivitas amal, keadilan dan amanah dalam kepemimpinan, serta keterbukaan selektif dalam kolaborasi.

Kajian prinsip manajemen pendidikan Islam berbasis ayat tersebut menjadi penting karena mampu memberikan arah baru bagi pengembangan manajemen pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga berakar pada nilai-nilai moral, spiritual, dan humanistik. Selain itu, gagasan ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan Islam tidak boleh terjebak dalam tradisionalisme yang statis, tetapi harus adaptif, kritis, dan inovatif dalam menghadapi tantangan global (Yaqin & Noor, 2022). Oleh karena itu, artikel ini menawarkan solusi berbasis pemikiran untuk merumuskan model prinsip manajemen pendidikan Islam yang fleksibel, efektif, *open-minded*, dan partisipatif melalui analisis konseptual dari landasan Al-Qur'an dan literatur manajemen pendidikan Islam kontemporer. Luaran akademik yang diharapkan dari tulisan ini adalah terbentuknya kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai acuan dalam praktik tata kelola lembaga pendidikan Islam serta sebagai landasan pengembangan model manajemen yang berkelanjutan dan kompetitif.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji prinsip manajemen pendidikan Islam berdasarkan QS. al-Hajj ayat 78, QS. al-Kahfi ayat 103-104, QS. an-Nisa ayat 58, dan QS. al-Maidah ayat 51. Sumber data terdiri dari tafsir al-Qur'an (Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar Hamka), artikel ilmiah, serta literatur manajemen pendidikan Islam yang relevan dengan prinsip fleksibilitas, efektivitas, keterbukaan, dan partisipasi. Proses analisis dilakukan dengan mereduksi data, mengelompokkan informasi sesuai tema,

serta mensintesis temuan konseptual untuk merumuskan model prinsip manajemen pendidikan Islam berbasis nilai Qur'ani.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen pendidikan Islam merupakan suatu proses pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien, serta berlandaskan nilai-nilai spiritual dan etika Qur'ani. Manajemen pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan teknis seperti perencanaan program, pengelolaan kurikulum, dan pengembangan tenaga pendidik, tetapi juga memuat dimensi pembinaan moral, akhlak, dan spiritual yang menjadi inti tujuan pendidikan Islam (Hadi, 2024). Manajemen pendidikan Islam dipandang sebagai instrumen strategis untuk mengarahkan seluruh aktivitas pendidikan agar berjalan secara teratur, terukur, dan menghasilkan perubahan yang bermakna dalam upaya mencetak manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia sesuai tujuan pendidikan Islam. Karena itu, manajemen pendidikan Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan manajemen umum karena menempatkan wahyu sebagai basis pengambilan kebijakan dan keputusan strategis.

Dalam perspektif konseptual, pengembangan manajemen pendidikan Islam harus berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan melalui pengelolaan yang terencana dan sistematis, berbasis kolaborasi dan evaluasi berkelanjutan. Manajemen pendidikan Islam yang berkualitas harus mengintegrasikan nilai fleksibilitas, efektivitas, keterbukaan, dan partisipasi sebagai prinsip utama pengelolaan kelembagaan pendidikan dalam merespons perubahan zaman (Yaqin & Noor, 2022). Sejalan dengan itu, literatur menunjukkan bahwa penguatan manajemen pendidikan Islam menuntut terciptanya sinergi antara nilai-nilai normatif Qur'ani dan praktik operasional organisasi pendidikan modern sehingga lembaga pendidikan Islam tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan fungsi pemberdayaan dan transformasi sosial. Dengan demikian, konsep manajemen pendidikan Islam tidak hanya memfokuskan pada pengaturan lembaga pendidikan, tetapi juga menekankan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun budaya organisasi pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan.

### 2. Prinsip-prinsip Manajemen Pendidikan Islam

Prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam merupakan pedoman dasar dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai Qur'ani dan etika Islami sebagai fondasi tata kelola organisasi. Prinsip manajemen dalam perspektif Islam tidak hanya menekankan pada aspek teknis seperti efektivitas administrasi, namun juga mengintegrasikan nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan (N. Harahap dkk., 2024). Manajemen pendidikan Islam harus dilandasi oleh empat prinsip utama, yaitu fleksibilitas, efektivitas, keterbukaan, dan partisipasi yang harus tercermin dalam seluruh aspek pengelolaan lembaga pendidikan (Yaqin & Noor, 2022). Prinsip fleksibilitas mengandung makna bahwa kebijakan, kurikulum, serta metode pembelajaran perlu dirancang secara adaptif agar mampu menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sementara itu, efektivitas menunjukkan pentingnya mengarahkan seluruh aktivitas pendidikan untuk mencapai hasil yang terukur dan berdampak nyata bagi pengembangan kompetensi, akhlak, serta peningkatan mutu pendidikan.

Selanjutnya, prinsip keterbukaan (*open-mindedness*) menekankan perlunya menerima pemikiran dan inovasi baru secara selektif dan kritis selama tidak bertentangan dengan nilai-

nilai Islam, termasuk dalam pemanfaatan teknologi, kerja sama institusional, dan pembaruan strategi pembelajaran. Prinsip keterbukaan ini diperlukan untuk menghindari eksklusivisme intelektual yang dapat menghambat perkembangan lembaga pendidikan Islam agar tetap relevan dan kompetitif dalam dinamika global. Adapun prinsip partisipasi menuntut adanya pelibatan seluruh komponen pendidikan seperti guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tercipta kepemimpinan kolaboratif yang berlandaskan musyawarah, transparansi, dan keadilan (Alifiyah dkk., 2025). Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat membangun budaya organisasi yang sehat dan berbasis nilai Qur'ani sehingga lembaga pendidikan Islam tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi pusat transformasi sosial dan moral masyarakat.

### 3. Analisis Ayat al-Quran Terhadap Prinsip Manajemen Pendidikan

Prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam merupakan pedoman dasar dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai Qur'ani dan etika Islami sebagai fondasi tata kelola organisasi. Prinsip manajemen dalam perspektif Islam tidak hanya menekankan pada aspek teknis seperti efektivitas administrasi, namun juga mengintegrasikan nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Manajemen pendidikan Islam harus dilandasi oleh empat prinsip utama, yaitu fleksibilitas, efektivitas, keterbukaan, dan partisipasi yang harus tercermin dalam seluruh aspek pengelolaan lembaga pendidikan (Yaqin & Noor, 2022). Prinsip fleksibilitas mengandung makna bahwa kebijakan, kurikulum, serta metode pembelajaran perlu dirancang secara adaptif agar mampu menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sementara itu, efektivitas menunjukkan pentingnya mengarahkan seluruh aktivitas pendidikan untuk mencapai hasil yang terukur dan berdampak nyata bagi pengembangan kompetensi, akhlak, serta peningkatan mutu pendidikan.

#### a. Prinsip Fleksibilitas dalam Perspektif QS. al-Hajj ayat 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَّةً  
 أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا  
 عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ  
 مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۗ ٧٨

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”

Ayat ini merupakan dasar teologis yang menegaskan bahwa Allah tidak menjadikan agama sebagai beban yang menyulitkan manusia. Prinsip kemudahan tersebut dipahami para *mufassir* sebagai penegasan bahwa syariat Islam dirancang untuk memfasilitasi perkembangan dan kebutuhan manusia, bukan membatasi atau memberatkan (Danisha, 2023). Karena itu, nilai fleksibilitas menjadi karakter bawaan dalam ajaran Islam untuk memastikan bahwa pelaksanaan perintah agama harus mempertimbangkan kondisi, kemampuan, dan masalah

bagi umat. Pesan normatif ini memberikan landasan bahwa setiap bentuk aturan, kebijakan, dan pelaksanaan amanah dalam bidang apa pun termasuk pendidikan tidak boleh bersifat kaku dan mempersulit.

Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, nilai fleksibilitas mengharuskan penyusunan kebijakan, kurikulum, dan strategi pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik dan tantangan zaman. Pendidikan harus mampu merespons perubahan sosial, perkembangan teknologi, perbedaan kemampuan intelektual dan psikologis peserta didik, serta dinamika kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas bukan berarti tidak memiliki prinsip, tetapi kebijakan harus dibangun berdasarkan pertimbangan maslahat (*benefit*), kemampuan (*capacity*), kemudahan (*ease*), dan keberlakuan (*applicability*) secara realistis (Perry, 2017). Dengan demikian, fleksibilitas menjadi penghubung antara nilai-nilai wahyu dan realitas kehidupan pendidikan.

Secara aplikatif, penerapan fleksibilitas tercermin melalui berbagai strategi seperti penyusunan kurikulum berjenjang yang mengakomodasi diferensiasi belajar, metode pembelajaran yang variatif, evaluasi berbasis perkembangan (*growth-based assessment*), kebijakan akademik yang memberi ruang remedial dan percepatan, serta pengelolaan organisasi yang tidak birokratis kaku (Irsyad dkk., 2024). Lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan struktur manajemen yang terbuka dan adaptif agar kebijakan dapat menyesuaikan kebutuhan nyata, bukan sekadar mempertahankan formalitas sistem. Dengan demikian, fleksibilitas menjadi prinsip operasional yang memastikan keberlangsungan mutu pendidikan sekaligus menjaga relevansinya bagi tantangan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat.

b. Prinsip Efektivitas dalam Perspektif QS. Al-Kahfi ayat 103-104

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٣

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٤

"Katakanlah (Muhammad), "Apakah perlu Kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?"[103] (Yaitu) orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.[104]"

Ayat ini menggambarkan kelompok manusia yang merasa perbuatan mereka baik dan penuh pencapaian, tetapi pada hakikatnya Allah menilai amal tersebut sia-sia karena tidak berlandaskan niat yang benar, tujuan yang tepat, dan manfaat nyata. Pesan moral dalam ayat ini menegaskan bahwa aktivitas yang tidak melahirkan hasil substantif dan tidak memberikan nilai hakiki dianggap pekerjaan yang gagal, meskipun secara lahiriah tampak sibuk dan produktif. Ayat ini mengajarkan prinsip evaluasi orientasi hasil (*result-oriented assessment*), yakni bahwa kebermaknaan amal tidak diukur dari tampilan luar atau rutinitas prosedural, tetapi dari capaian nyata, kesesuaiannya dengan tujuan, dan manfaatnya bagi kehidupan manusia (Yaqin & Noor, 2022).

Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, pesan ayat tersebut menjadi kritik terhadap praktik manajerial yang sekadar formalitas birokratis seperti penyusunan rencana kerja yang tidak diimplementasikan dengan baik, program kegiatan tanpa indikator capaian yang jelas, atau proses evaluasi yang hanya administratif tanpa mengukur dampak nyata. Prinsip efektivitas menuntut setiap kebijakan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan perubahan yang dapat diamati dan dirasakan, baik pada kompetensi akademik, pembentukan akhlak, maupun keterampilan sosial peserta didik (Annet, 2024). Prinsip ini memperingatkan bahwa aktivitas pendidikan yang sibuk namun tidak berdampak hanya akan menjadi bentuk kesia-siaan yang dikecam ayat.

Secara aplikatif, prinsip efektivitas dapat diwujudkan melalui penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data, penetapan indikator keberhasilan yang terukur, penyusunan target capaian yang realistis dan terencana, serta penggunaan instrumen evaluasi seperti pre-test, post-test, portofolio perkembangan, observasi perilaku, dan umpan balik stakeholder. Selain itu, efektivitas juga mengharuskan lembaga pendidikan melakukan refleksi berkala terhadap praktik pembelajaran dan tata kelola organisasi, menghapus kegiatan yang tidak memberikan kontribusi, serta mengalokasikan sumber daya pada program yang terbukti produktif dan bermanfaat. Dengan demikian, efektivitas menjadi prinsip operasional untuk memastikan bahwa setiap aktivitas manajemen pendidikan menghasilkan *output* dan *outcome* yang nyata serta bernilai strategis.

c. Prinsip Partisipasi dalam Perspektif QS. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

QS. an-Nisa ayat 58 menegaskan perintah untuk menunaikan amanah kepada yang berhak serta memutuskan perkara dengan adil. Ayat ini oleh para *mufassir* dipahami sebagai fondasi etika kepemimpinan, kepercayaan, dan tata kelola sosial (Sidqy & Taqwa, 2025). Amanah diartikan sebagai kewajiban moral dan tanggung jawab profesional yang harus dijalankan secara jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosial maupun spiritual. Keadilan, sebagai nilai yang menyertai amanah, menuntut adanya kesetaraan dalam pemberian hak, dalam pengambilan keputusan, dan dalam keberpihakan pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar bahwa pengelolaan urusan manusia tidak dapat dijalankan secara otoriter, melainkan harus melibatkan pihak yang terkait secara adil dan proporsional.

Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, prinsip ini menegaskan pentingnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan program, dan pelaksanaan kegiatan pendidikan. Partisipasi dipahami bukan sekadar bentuk konsultasi formal, tetapi kolaborasi aktif yang mengakui peran dan kontribusi semua komponen pendidikan seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pelibatan *stakeholder* dalam pengelolaan lembaga akan meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*), memperkuat komitmen, serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas kebijakan (Harahap & Siregar, 2024). Hal ini juga memperkuat legitimasi keputusan manajemen sehingga kebijakan lebih mudah diterima dan dipahami serta mencegah munculnya konflik dan resistensi.

Secara operasional, partisipasi dapat diwujudkan melalui pembentukan forum musyawarah resmi seperti rapat komite sekolah, dewan pendidikan, majlis guru, atau forum warga sekolah yang transparan dan representatif. Selain itu, mekanisme seperti survei kepuasan, dialog terbuka, sistem umpan balik, dan pelibatan siswa dalam organisasi sekolah merupakan langkah strategis untuk memastikan suara semua pihak didengar dan dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan. Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan perlu menjalankan gaya kepemimpinan kolaboratif dan partisipatif yang

menekankan delegasi wewenang, kemitraan, dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, prinsip partisipasi berdasarkan amanah dan keadilan tidak hanya membentuk tata kelola pendidikan yang sehat, tetapi juga menciptakan budaya organisasi yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan perkembangan lembaga.

d. Prinsip Open-Minded Selektif dalam Perspektif QS. Al-Maidah: 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥١

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim.”*

QS. al-Māidah ayat 51 memuat peringatan agar berhati-hati dalam menjadikan pihak lain sebagai pemimpin atau sekutu strategis yang berpotensi membawa mudarat dan melemahkan posisi umat. Ayat ini mengandung prinsip etika sosial dan politik yang menuntut kehati-hatian dalam menjalin kerja sama dan bergantung pada pihak luar. Pesan utama ayat ini bukanlah penutupan diri terhadap pihak lain, tetapi penegasan bahwa keterbukaan harus disertai pertimbangan moral, nilai, dan masalah. Karena itu, ayat ini memuat dasar teologis bagi prinsip *open-minded* selektif, yakni sikap terbuka terhadap pengetahuan, kolaborasi, dan inovasi, namun dengan filter nilai agar tidak menimbulkan kerusakan akidah, identitas, atau integritas umat (Yuliati dkk., 2022).

Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, pesan ayat ini menegaskan bahwa lembaga pendidikan perlu membuka diri terhadap perkembangan global seperti teknologi digital, model pembelajaran baru, dan kemitraan antar lembaga, tetapi tetap konsisten menjaga karakter pendidikan Islam yang berlandaskan nilai Qur’ani. Sikap *open-minded* yang selektif mencegah dua ekstrem berbahaya: pertama, sikap tertutup yang menolak perubahan dan pembaruan; kedua, sikap permisif yang menerima segala sesuatu tanpa pertimbangan nilai (Wilson dkk., 2017). Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mengadopsi inovasi berdasarkan prinsip kemaslahatan, identitas keilmuan, relevansi, dan kesesuaian nilai Islam, bukan karena tekanan tren atau kebutuhan citra institusional.

Secara implementatif, prinsip keterbukaan selektif dapat diwujudkan melalui penyusunan kebijakan kemitraan yang berbasis kriteria etika dan profesional, evaluasi menyeluruh sebelum menerapkan kurikulum atau teknologi baru, dan penerapan kajian ilmiah terhadap setiap kerja sama yang diusulkan. Lembaga pendidikan Islam juga perlu membangun budaya ilmiah kritis yang melatih pendidik dan peserta didik untuk mengkaji dan menilai informasi secara objektif dan etis. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan literasi digital kritis, kajian akademik berbasis riset, forum diskusi terbuka, serta mekanisme audit akademik terhadap program baru. Dengan demikian, prinsip *open-minded* selektif memastikan bahwa keterbukaan lembaga pendidikan menghasilkan kemajuan, namun tetap menjaga integritas nilai Islam dan jati diri institusi.

Berdasarkan analisis keempat ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan Islam yang Qur’ani harus memenuhi empat prinsip utama berikut:

**Tabel 1.** Konseptual dan Implikasi Manajerial

Prinsip	Dasar Ayat	Implementasi Manajerial
Fleksibel	al-Hajj ayat 78	Kurikulum adaptif, desain pembelajaran humanis, pengurangan birokrasi
Efektif	al-Kahfi ayat 103-104	Evaluasi berbasis capaian, pengelolaan kinerja, optimalisasi sumber daya
Partisipatif	an-Nisa ayat 58	Kepemimpinan kolaboratif, transparansi, akuntabilitas organisasi
<i>Open-Minded</i> Selektif	al-Maidah ayat 51	Inovasi terarah, kerja sama strategis yang sejalan dengan nilai Islam

## D. PENUTUP

### Simpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa prinsip fleksibilitas, efektivitas, keterbukaan selektif, dan partisipasi merupakan fondasi penting bagi penguatan manajemen pendidikan Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman. Keempat prinsip tersebut memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, yakni QS. al-Hajj ayat 78, QS. al-Kahfi ayat 103–104, QS. an-Nisa ayat 58, dan QS. al-Maidah ayat 51. Fleksibilitas menuntun lembaga pendidikan untuk adaptif terhadap kebutuhan peserta didik dan dinamika sosial; efektivitas menegaskan pentingnya orientasi hasil dan penghindaran aktivitas yang tidak produktif; partisipasi memperkuat akuntabilitas dan kolaborasi; sementara keterbukaan selektif memungkinkan inovasi tetap berjalan tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penerapan keempat prinsip ini menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pendidikan Islam yang lebih bermutu, berkelanjutan, dan mampu bersaing di era modern.

### Saran

Ke depan, pengelola lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat penerapan prinsip-prinsip Qur'ani ini melalui kebijakan yang adaptif, berbasis data, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model implementasi praktis dari empat prinsip tersebut pada berbagai jenis lembaga pendidikan, agar konsep yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga operasional. Selain itu, pelatihan kepemimpinan berbasis nilai Qur'ani perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa proses manajerial berjalan secara amanah, terbuka, dan efektif.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Alifiyah, N., Tarihoran, N., Djabidi, F., Gunawan, A., & Hanafi, H. (2025). The Implementation of Democratic Leadership Style based on Islamic Values toward Increasing School Community Participation at MI Balaraja-Tagerang. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(7), 3473–3486. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i7.304>
- Annet, K. A. (2024). Evaluating the Effectiveness of Educational Policies. *IDOSR: Journal of Communication and English*, 9(3), 6–10. <https://doi.org/10.59298/IDOSR/JCE/93.610.202400>
- Danisha. (2023). Konsep Sikap Keseimbangan dalam Beragama Menurut Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Ibnu Katsir terhadap Surah Al-Maidah Ayat 77 dan Al-Hajj Ayat 78 dalam Tafsir Al-Quran Al-Azhim). *Anwarul*, 3(4), 740–750. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i4.1326>
- Hadi, N. (2024). Education Management In Islamic Perspective. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(4), 6751–6758. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i4.2471>
- Harahap, A. M., & Siregar, S. (2024). Pedoman Memilih Pemimpin dalam al-Quran (Studi Tafsir al-Azhar Karya Hamka). *Al Fawatih: Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/alfawatih.v6i1.13844>

- Harahap, N., Harahap, A. H. J., & Rukhaiyah, S. (2024). Management Principles from an Islamic Perspective: Exploration of the Interpretation of the Qur'an. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 5(2), 674–684. <https://doi.org/10.51178/jsr.v5i2.2048>
- Irsyad, S. F., Syarif, H., & Zainil, Y. (2024). Flexible Approach In English Language Learning Curriculum Design: Optimizing Teaching In Merdeka Curriculum. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(11), 9843–9852. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i11.43675>
- Perry, A. (2017). The Flexibility Rule in Administrative Law. *SSRN Electronic Journal*, 1(1), 1–33. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2893766>
- Safira, A., Nursanti, D., Fadhillah, A. M., & Azis, A. (2025). Problems and Challenges of Islamic Education Today and Their Solutions in the Global Era. *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, 1(2), 130–148. <https://doi.org/10.69836/synergy.v1i2.62>
- Sidqy, M., & Taqwa, H. (2025). Tafsir Tahlili Q.S An-Nisa Ayat 58-63; Dasar-Dasar Pemerintahan. *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, 3(2), 154–169. <https://doi.org/10.56672/am3b6m64>
- Wilson, C., Ottati, V., & Price, E. (2017). Open-Minded Mognition: The Attitude Justification Effect. *The Journal of Positive Psychology*, 12(1), 47–58. <https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1167941>
- Yaqin, H., & Noor, H. (2022). Education Management in the Qur'an Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 5(1), 3104–3113. <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3959>
- Yuliati, P., Qardlawi, M. Y., & Wulandari, M. (2022). Pendekatan Ma'na Cum Maghza Tentang Pemimpin Non Muslim (Analisis Terhadap al-Maidah:51). *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al Qur'an*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/hq.v3i2.118>
- Zainuddin, Amrullah, A. M. K., & Zuhriyah, I. A. (2025). The Challenges of Developing Islamic Education Curriculum and Strategies for Its Development in Facing Future Competency Demands. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 6(1), 111–126. <https://doi.org/10.31538/tijie.v6i1.1316>